

# Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia<sup>1</sup>

*Mudrajad Kuncoro*

*This paper attempts to explore to what extent the current regime has changed the business and investment climate in Indonesia. Tsunami and earthquake in various regions overshadowed and sank the hope of fundamental changes by what is called as one hundred day of SBY-JK. Our findings illuminate that the SBY-JK regime has not addressed some critical problems encountered by industries and companies thoroughly. Therefore, we argue some suggested corrective actions based the surveys are badly needed for the new cabinet and local governments in Indonesia. The major reforms may include: (1) changing source of economic growth, from consumption driven to investment/export-led growth; (2) some corrective actions to eliminate, at least reduce, the barriers along roads, seaports, and customs to increase export and eliminate corruption; (3) a well designed and comprehensive medium term planning to highlight the pathways that both central and local government will pursue.*

**Kata-kata kunci:** *reformasi, investasi, iklim bisnis, korupsi, pungli*

Dipilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden nampaknya mencerminkan tingginya harapan rakyat akan perubahan mendasar di Indonesia. Minggu pertama Desember 2004, Presiden menandatangani kanvas antikorupsi, yang menandai perang terhadap korupsi. Dalam kanvas tersebut, SBY menuliskan pesan "Mari kita bangun Indonesia yang bersih-bersih dari korupsi". Masih segar dalam ingatan kita, dalam pidato 30 hari pertama pemerintahannya, SBY menjelaskan tiga strategi dalam bidang ekonomi, yang disebut *triple strategy*, yaitu: mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembali sektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Untuk program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden meminta para menteri agar

menyusun program yang dapat memberi terapi kejut (*shock therapy*), untuk memberi keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah paham dan mengetahui apa yang diharapkan dan yang menjadi persoalan masyarakat.

Namun gelombang tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara seakan menenggelamkan antusiasme rakyat akan angin perubahan yang dihembuskan oleh pemerintahan SBY-JK. Di tengah keprihatinan bangsa akan bencana tsunami, pemerintah tetap menaikkan harga pupuk, menolak tawaran moratorium utang luar negeri, dan nampaknya tetap akan menaikkan harga BBM. Kendati masih terlalu dini menilai kinerja pemerintahan SBY, mari kita kaji

<sup>1</sup> Disempurnakan dari makalah yang disajikan dalam "Diskusi Panel Ahli Kompas", Harian Kompas, Gedung Gramedia Unit III Lantai 5, Jakarta, 24 Januari 2005.

secara kritis bagaimana komitmen dan peluang pemerintah melaksanakan ketiga strategi dan perang terhadap korupsi. Artikel ini terutama akan menyoroiti sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, tren investasi, dan seberapa jauh perubahan lingkungan bisnis. Tentunya menarik, untuk mengkaji ulang strategi reformasi yang telah dan seharusnya dilakukan oleh pemerintah di bawah SBY-Kalla.

### Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi makro Indonesia boleh dikata mengalami perbaikan sejak tahun 2000. Ditopang oleh penurunan laju inflasi, suku bunga, dan menguatnya nilai rupiah, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh setidaknya 4,8% tahun 2004. Kendati belum mampu memecahkan masalah pengangguran, angka ini sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi

menunjukkan trend peningkatan selama 5 tahun terakhir. Ini sejalan dengan menurunnya rasio tabungan/pendapatan di satu sisi, tapi meningkatnya indeks penjualan ritel riil, kredit konsumsi, penjualan mobil/sepeda motor, dan impor barang konsumsi (BI, 2004). Inilah yang menjelaskan mengapa di tengah krisis, orang tetap berjubel memenuhi mal, mau beli mobil meski harus inden 3-7 bulan, jalanan semakin penuh dengan sepeda motor, penjualan rokok dan ponsel meningkat terus.

Tak heran, majalah Far Eastern Economic Review (FEER) selalu mencatat 10 perusahaan terbaik Indonesia dalam jajaran "200 Best Companies in Asia". Tabel 2 tidak hanya memperlihatkan nama 10 perusahaan terbaik namun juga komoditi/industri yang cenderung menunjukkan perilaku konsumtif rakyat Indonesia: tetap beli mobil/sepeda motor, makan mie instant, *ngrokokan* untuk

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Permintaan Agregat, 2000-4

Indikator (%)	2000	2001	2002	2003	2004*	Rata-rata per tahun (2000-4)
Pertumbuhan ekonomi	4.9	3.5	3.7	4.1	4.8	4.2
# Konsumsi	2.0	3.9	4.7	4.6	5.7	4.2
# Investasi	16.7	6.5	0.2	1.4	8.5	6.7
# Ekspor	26.5	2.9	(0.6)	4.0	3.8	7.3
# Impor	25.9	8.2	(5.0)	2.0	8.3	7.9

\* angka sementara

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia

per tahun selama lima tahun terakhir, yakni 4,2%. Rekor ini jauh di atas pertumbuhan ekonomi tahun 1999 dan 1998, yang masing-masing hanya 0,79% dan -13,1%.

Bila disimak, konsumsi tetap merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara pertumbuhan investasi dan ekspor netto masih cukup rendah. Konsumsi pemerintah dan swasta

penghilang stress, ke mana-mana nenteng ponsel, nonton TV terus, sambil minum teh botol.

### Tren Investasi

Dicanangkannya tahun 2003 dan 2004 sebagai "tahun investasi" ternyata belum banyak menarik para investor menanam modal di Indonesia. Musim paceklik

investasi di Indonesia jelas terlihat dari menurunnya arus investasi sejak tahun 1997. Gambar 1 menunjukkan tren nilai persetujuan PMDN dan PMA (dalam jutaan Rupiah, PMA dikonversikan dengan nilai tukar sekarang) 1967/1968 – Nopember 2004. Nilai investasi meliputi proyek baru, perluasan; dan alih status dan tidak termasuk migas, lembaga keuangan non-bank, asuransi dan *leasing*. Nilai investasi naik drastis selama periode 1988-1997 namun kemudian menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997. Nilai investasi terus mengalami trend penurunan selama 2001-2004, periode pasca otonomi daerah dijalankan.

tahun 1997 tercatat Rp 119 trilyun dengan jumlah proyek 723 unit. Data tahun 2003 terbukti tinggal Rp 50 trilyun dengan 196 proyek; sampai dengan November 2004 nilai PMDN tercatat Rp 33,4 trilyun dengan 158 proyek.

Bagaimana dengan investasi asing yang masuk lewat PMA (penanaman modal asing)? Rekor PMA setali tiga uang: tahun 1997 nilainya sebesar USD 33,7 milyar dengan 778 unit proyek; pada tahun 2003 anjlok menjadi USD 14 milyar dengan jumlah proyek 1.170 unit. Sampai dengan November 2004, nilai PMA tercatat sebesar USD 9,6 milyar dengan 1.066 unit proyek.

**Tabel 2. Peringkat Top 10 Perusahaan Indonesia dalam Jajaran “200 Best Companies in Asia” versi FEER**

2003	2001	2000	1999	Perusahaan	Skor
3	1	1	2	Astra Int	6.06
1	2	2	3	Indofood	5.90
6	3	3	6	Sampoerna	5.72
4	4	4	1	Gudang Garam	5.55
7	5	5	5	Indosat	5.42
8	6	8	7	Djarum	5.10
9	7	9	(-)	Telkomsel	5.03
-	8	(-)	(-)	Satelindo	4.97
10	9	7	(-)	Sosro	4.95
-	10	10	(-)	SCTV	4.94

Data BKPM menunjukkan, nilai PMDN (penanaman modal dalam negeri) pada

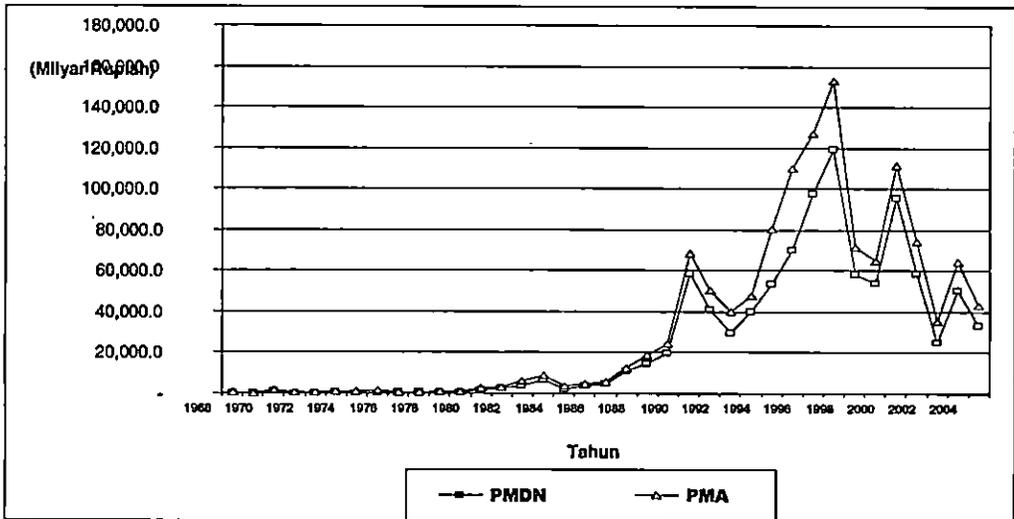
Baik PMDN dan PMA memiliki pola yang sama. Hal tersebut menindikasikan

Topik: Evaluasi Pemerintahan Baru

bahwa investor asing dan domestik mempunyai ekspektasi yang sama. Yang menarik adalah aliran investasi asing langsung yang negatif yang masih terus berlanjut bahkan setelah tahun 2000. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah negara yang paling terpuuk akibat krisis ekonomi dan satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan FDI yang negatif (LPEM & JETRO, 2003).

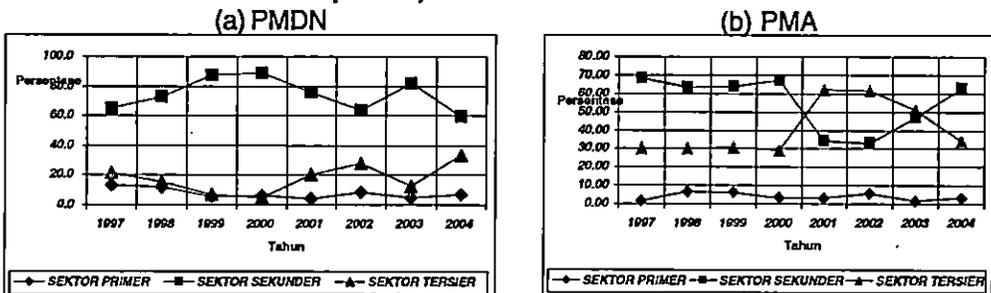
Gambar 2a dan 2b menunjukkan tren persetujuan PMDN dan PMA menurut sektor (primer, sekunder, dan tersier) selama tahun 1997-November 2004. Untuk PMDN, sektor sekunder merupakan sektor favorit dengan lebih dari 60% dari total PMDN. Sub-sektor yang menjadi favorit investor dalam negeri untuk sektor sekunder adalah industri kimia dan farmasi; industri makanan; dan industri kertas dan percetakan. Sumbangan sektor tersier dan primer relatif tetap rendah yaitu

**Gambar 1. Tren Investasi Asing (PMA) dan Domestik (PMDN), 1967/1968 – November 2004**



Sumber: BKPM (2004)

**Gambar 2. Trend Persetujuan PMDN dan PMA Menurut Sektor (dalam persen) 1997-November 2004**



Source: BKPM (2004)

masing-masing di bawah 30 persen dan 15 persen. Sementara itu, sumbangan sektor primer, sekunder, dan tersier untuk PMA menunjukkan perubahan pola. Sebelum 2001, sektor sekunder mendominasi investasi asing langsung yang sebesar 60-70% dari total.

Pola yang paling menarik adalah setelah penerapan otonomi daerah (2001), sumbangan sektor tersier meningkat baik untuk PMDN dan PMA. Sub-sektor dominan untuk sektor tersier adalah transportasi, penyimpanan dan komunikasi; real estate dan kegiatan bisnis; hotel dan restoran; dan konstruksi.

Gambar 3a dan 3b menunjukkan tren sumbangan PMDN dan PMA menurut lokasi selama tahun 1997-November 2004. Baik PMDN dan PMA, Jawa-Bali dan Sumatra tetap mendominasi sebagai pilihan lokasi investasi, baik sebelum dan setelah otonomi daerah. Untuk Jawa dan Bali, persetujuan PMDN dan PMA masing-masing adalah sebesar 40,7% dan 59,9% serta untuk Sumatra masing-masing sebesar 24,8% dan 25%. Yang menarik adalah khusus untuk tahun 2003, persetujuan PMDN di Sulawesi dan Katimin mengalami lonjakan yang sangat drastis menjadi 68,7% namun turun lagi menjadi 14,1 % sampai November 2004.

### **Adakah Perubahan Iklim Investasi?**

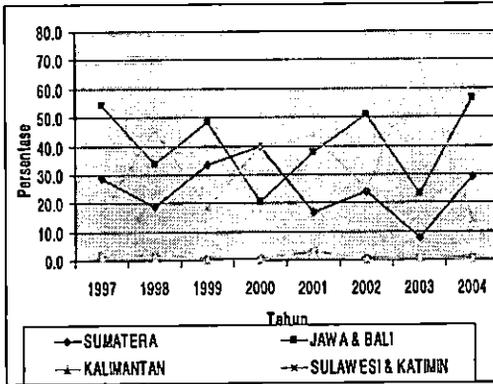
Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Berbagai survei membuktikan, faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalah: tenaga kerja dan produktifitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi. Survei yang dilakukan oleh KPPD (2002) menunjukkan bahwa

institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktifitas tenaga kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama pertimbangan investasi. Studi terhadap lebih dari 2,000 perusahaan di lebih dari 60 kabupaten/kota yang dilakukan oleh LPEM FEUI (2000) menemukan bahwa alasan utama di balik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.

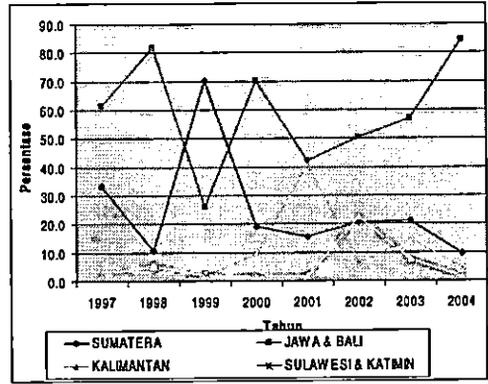
Banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia (misal: Hofman, et al. 2003; Smeru, 2001; Ray, 2003, 2002). Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak "pro-bisnis" diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemda maupun pemerintah pusat), perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (World Bank, 2004).

Studi saya bersama Pusat Studi Asia Pasifik UGM baru-baru ini menunjukkan masih adanya "grease money" dalam bentuk pungli, upeti dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak

**Gambar 3. Trend Persetujuan PMDN dan PMA Menurut Lokasi (dalam persen) 1997-November 2004**



(a) PMDN



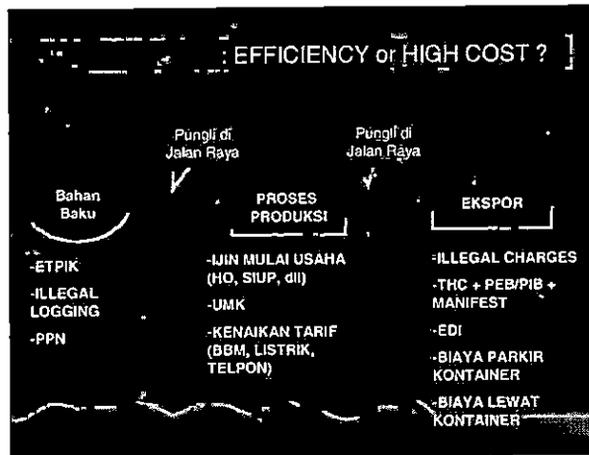
(b) PMA

Source: BKPM (2004)

mencari bahan baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor (lihat Gambar 4). Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perijinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dll) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha, terutama

yang berorientasi ekspor (gambar 2). Rata-rata persentase pungli terhadap biaya ekspor setahun adalah 7,5%, yang diperkirakan sebesar Rp 3 triliun atau sekitar 153 juta dolar AS! Lokasi yang dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya dan pelabuhan.

**Gambar 4. Hambatan Arus Barang dan Ekspor di Indonesia**



\* Berdasarkan survei di Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali  
 Sumber: Kuncoro et al. (2004)

Lingkungan perijinan Indonesia memang terus disorot. Survei UNCTAD (2004) baru-baru ini, dengan judul *World Investment Report 2004*, mencatat peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah nomor 2 dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Betapa tidak. Waktu untuk mengurus ijin investasi masih dikeluhkan terlalu lama (151 hari untuk memulai bisnis baru), prosedur ekspor yang lambat dan kompleks sehingga membuat biaya logistik dan transpor menjadi tidak kompetitif, ditambah korupsi yang masih berlanjut di bea cukai dan pelabuhan.

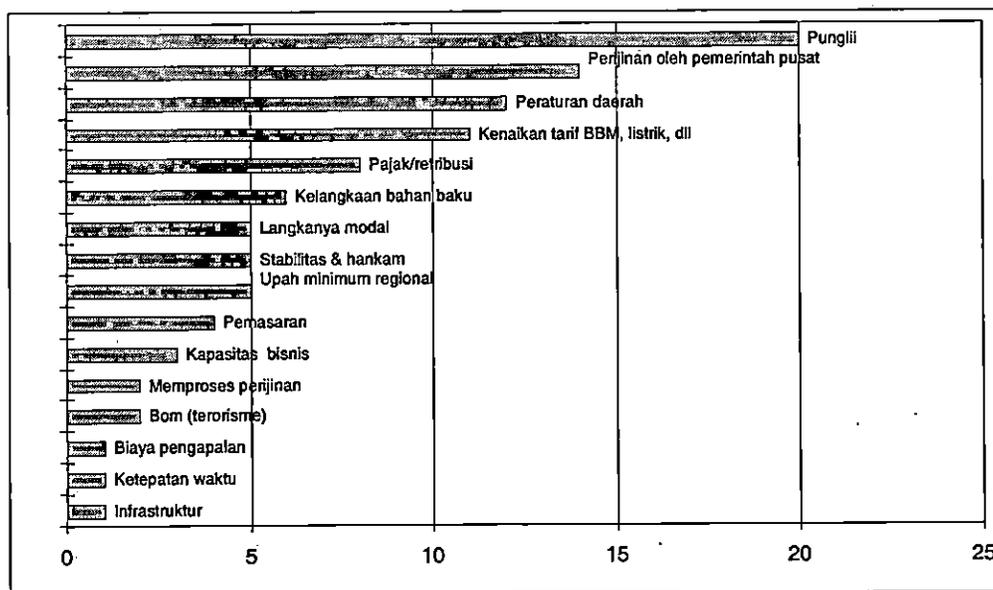
Dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD), pemerintah daerah menerapkan beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela dan pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis. Usaha tersebut ternyata mengakibatkan distorsi perdagangan dan tidak sesuai dengan UU

No. 34/2000. Situasi saat ini menyebabkan lebih banyak kekhawatiran, khususnya di kalangan investor domestik dan asing, Pemerintah Daerah bersikeras akan hak atas kepemilikan saham pelabuhan dan pajak dari perusahaan asing yang beroperasi di daerah mereka, khususnya perusahaan-perusahaan pertambangan. Fanatisme sektoral mulai bergeser menjadi fanatisme daerah yang overdosis.

### Perlunya Reformasi

Dengan harapan dan mandat yang besar dari rakyat dan warisan kinerja makroekonomi yang membaik selama periode Megawati (Aswicahyono & Hill, 2004), pemerintah SBY-JK memiliki peluang emas untuk melakukan perubahan mendasar bagi Indonesia. *Pertama*, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Untuk

Gambar 5. Hambatan yang Dirasakan Para Pelaku Bisnis (%)\*



Sumber: Kuncoro et al. (2004)

itu, diperlukan perbaikan iklim investasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-propinsi-kabupaten/kota) dan pada tingkat horisontal (antar kementerian dan badan lainnya), terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia, yang mencakup setidaknya reformasi berikut ini:

1. *Reformasi pelayanan investasi.* Dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perijinan, dan 'lampu hijau' dari BKPM atau BKPMD untuk tahap awal. Tahap perijinan dan implementasi proyek investasi sering tertunda karena untuk melakukan bisnis di Indonesia butuh 168 hari dengan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5% dari rata-rata pendapatan (WB, 2004). Koordinasi antar tingkatan pemerintahan, baik vertikal maupun horisontal, sangatlah penting. Rencana diterbitkannya Inpres tentang "one stop service" BKPM dan RUU penanaman modal amat dinanti kehadirannya. Kendati demikian, banyak pemda mengawatirkan langkah ini sebagai upaya pemerintah pusat untuk melakukan resentralisasi dan mencabut kewenangan dalam pemberian izin investasi.
2. Tiga hal utama yang diinginkan investor dan pengusaha: *penyederhanaan sistem dan perijinan, penurunan berbagai pungutan yang tumpang tindih, dan transparansi biaya perijinan.* Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arus barang & jasa tapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi. Barangkali

deregulasi dan koordinasi berbagai peraturan daerah dan pusat merupakan "starting point". Selain itu, pengalaman China menarik modal asing perlu kita kaji apakah menarik untuk dicoba (Kuncoro, 2004). Di China, untuk perijinan cukup menghubungi Kantor Investasi Asing. Untuk investasi minimal sebesar US\$30 juta, aplikasi investasi harus mendapat ijin dari pusat. Namun di bawah jumlah itu, cukup menghubungi Kantor Investasi Asing di daerah. Waktu persetujuan investasi asing maksimal 3 hari. Bila lebih dari 3 hari tidak ada pemberitahuan dari kantor ini, otomatis permohonan investasi dianggap diterima. Selain itu, modal asing diperkenankan memiliki aset antara 50 hingga 70 tahun.

3. *Reformasi peraturan* dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemda. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan sistem saat ini adalah: (1) tidak semua Perda diserahkan kepada pemerintah pusat; (2) proses review Perda dinilai lambat karena dibebankan kepada pemerintah pusat; (3) banyak pemda mengabaikan aturan mengenai Perda bermasalah. Oleh karena itu, agenda reformasi yang perlu dilakukan adalah: pemerintah provinsi diberi kepercayaan dan wewenang untuk: (1) mengkaji semua Perda dari pemda kabupaten/kota di wilayahnya; (2) bekerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalam mengembangkan prosedur dan standar pengkajian Perda.

Perubahan mendasar *kedua*, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masih berperilaku sebagai PREDATOR dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ini tantangan besar bagi presiden SBY dan

kabinetnya. Bila mau meningkatkan kinerja ekspor dan menumpas korupsi, maka disarankan: "membersihkan" jalan raya,

pelabuhan, beacukai, dan kepolisian dari berbagai bentuk *grease money*. Tabel 3 meringkas beberapa aksi korektif yang

**Table 3. Beberapa Aksi Korektif yang Dianjurkan dan Ditunggu oleh Pelaku Bisnis**

Kendala	Masalah	Aksi yang dianjurkan	Penanggung jawab
"Grease money" di jalan, pelabuhan, memproses ijin bisnis, bea-cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktek korupsi begitu sering terjadi sehingga menimbulkan biaya ekstra bagi dunia bisnis.</li> <li>• Perusahaan yang berorientasi ekspor mengalami kesulitan dalam menyalurkan keluhan secara formal baik lewat jalur legal atau administratif.</li> <li>• Meningkatnya jumlah pungutan, baik resmi maupun liar, sepanjang jalur distribusi dan pelabuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan UU No. 28/1999, pejabat harus melaporkan kekayaannya. Hasil audit atas laporan tsb, bila diketemukan adanya indikasi korupsi, maka harus dihukum berat.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas penegak hukum.</li> <li>• Menyediakan mekanisme dan saluran untuk komplain bagi bisnis tentang pungli maupun pungutan di atas tarif resmi.</li> <li>• Menghapuskan berbagai biaya ekstra dengan mempromosikan transparansi dan "Good Governance".</li> </ul>	<p>Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, pemerintah daerah, Pelindo, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Menko Perekonomian, Jaksa Agung</p>
EDI (Electronic Data Interchange)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi EDI dipenuhi dengan beberapa masalah dalam implementasinya.</li> <li>• Pengusaan yang tidak mencukupi tentang EDI telah menyebabkan kebingungan bagi para pelaku bisnis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah harus mengatur ulang mekanisme dan sistem EDI. Secara konseptual, kebijakan EDI ditujukan untuk mengurangi kontak personal dengan para petugas dan mengurangi pungli. Pada kenyataannya, kebijakan ini menyebabkan munculnya pungli dalam bentuk baru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirjen Bea-cukai dan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan . KPK.</li> </ul>
ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instruksi dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian (No.32/MMP/Kep/1/2003) tentang ETPIK muncul sebagai hambatan peraturan utama bagi para ekportir di Bali, Jepara, dan Surabaya karena mereka bukan produsen produk kayu melainkan pedagang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meski ETPIK didesain untuk mengurangi penebangan liar, tetapi pada kenyataannya, <i>illegal logging</i> tetap ada.</li> <li>• Beberapa aksi dibutuhkan: (1) Meninjau ulang kebijakan ETPIK; (2) Mendesentralisasi BRIK yang ada di Jakarta ke tingkat provinsi; (3) Mengurangi <i>illegal logging</i> dengan meningkatkan kinerja polisi hutan dan Perhutani; (4) Membolehkan pemerintah provinsi untuk memperbaiki ETPIK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian.</li> </ul>
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya ketakutan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 63/2003 tentang penganan PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) di kawasan berikat mengurangi daya tarik dan kondusifitas iklim bisnis di daerah (misalnya di Batam).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah harus lebih banyak mensosialisasikan peraturan ini.</li> <li>• Kebijakan yang transparan harus menjadi aspek utama dalam penyusunan peraturan.</li> <li>• Mengkaji ulang dampak PPN dan PPn BM pada tingkat daya saing perusahaan karena peranan bahan baku impor masih substansial.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menteri Keuangan, Badan Otorita Batam, Pemda, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian.</li> </ul>
Upah Minimum Regional/ Kota/Kabupaten/Provinsi (UMK/P)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Upah Minimum Regional yang dinilai terlalu memberatkan perusahaan.</li> <li>• Ketidakkonsistenan antara pemerintahan pusat dan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dibutuhkan antara Pemda dan pemerintah Pusat.</li> <li>• Mengatur UMK/P berdasarkan produktivitas tenaga kerja dan kemampuan perusahaan untuk membayar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda &amp; pemerintah pusat, Serikat Pekerja, Asosiasi Bisnis.</li> </ul>

dianjurkan berdasarkan survei, yang sudah dilakukan, untuk kabinet SBY-JK dan pemerintah daerah di Indonesia. "Grease money", implementasi EDI, berbagai perijinan usaha (contoh ETPIK, berbagai ijin lokal), dan peraturan upah minimum regional ditemukan sebagai masalah kunci pada era otonomi daerah.

Perubahan mendasar *ketiga*, diperlukan rencana reformasi yang komprehensif dan berjangka menengah, setidaknya 5 tahun ke depan. Tiadanya GBHN dan LOI (Letter of Intent) menuntut pemerintah untuk menjelaskan bagaimana arah perubahan yang akan ditempuh. Presiden SBY memang sudah menugaskan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas untuk menyusun perencanaan jangka menengah/panjang, namun hingga 100 hari pemerintahannya nampaknya belum diumumkan. Belajar dari perencanaan pembangunan nasional di masa lalu, setidaknya dikenal beberapa kecenderungan:

1. Belum dimasukkannya dimensi spasial dalam perencanaan pembangunan. Seolah-olah kita hidup dalam dunia 'aspasial' (*spaceless*), di mana faktor perbedaan masalah dan potensi antar kecamatan, kabupaten, dan kota dianggap tetap dan seragam. Perlu dicatat bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak merata dirasakan antardaerah. Pada saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi -13,1% pada tahun 1998, terbukti propinsi Irian Jaya tumbuh 12,7%, demikian juga dengan Batam yang mengenyam pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Jelas bahwa *country risk* tidak identik dengan *regional risk*, resiko melakukan bisnis di daerah. Memang sudah ada RUTRW
- (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah). Namun RUTRW nampaknya dalam praktek lebih banyak dilanggar karena pertimbangan jangka pendek yang pragmatis.
2. Pendekatan sektoral masih lebih menonjol daripada regional. Di masa pemerintah Soeharto, ini jelas tampak dengan dominannya penerapan asas dekonsentrasi dan orientasi sektoral. Pendekatan semacam ini sah saja karena paradigma sentralisasi amat kuat. Tak dapat dipungkiri, yang terjadi adalah pembangunan 'di daerah', dengan inisiatif, petunjuk, dan dana dari pusat. Budaya Bimas (bimbingan melulu dari atas), Inmas (instruksi melulu dari atas), dan tuntas (tuntunan dari atas) sudah mengakar di benak dan praktek sehari-hari para birokrat di daerah. Di era otonomi daerah sejak tahun 2001, harusnya paradigma 'membangun daerah' lebih difokuskan (Kuncoro, 2004). Artinya, daerahlah yang harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Implikasinya, Pemerintah pusat tidak bisa menjalankan perencanaan "cetak biru", yang seragam untuk seluruh daerah, tapi harus mempertimbangkan perbedaan potensi dan masalah antardaerah, dan dampak aktivitas ekonomi antardaerah (*regional spillovers*). Selain itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi strategi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Belum dianutnya perencanaan antisipatif terhadap berbagai macam

"gangguan" (*disruption*), baik karena alam (tsunami, gempa, banjir) maupun manusia (misal: bom, kebakaran). Dalam ilmu perencanaan, ini disebut *perencanaan interaktif* yang memahami perlunya menjadi fleksibilitas terhadap keadaan yang terus menerus berubah (Kuncoro, 2004: bab 3). Pendekatan ini merupakan solusi ketidakefektifan perencanaan dampak di daerah-daerah yang mengalami kontraksi perekonomian (laju pertumbuhan negatif, deindustrialisasi, dan banyak pengangguran). Sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang muncul. Pendekatan ini mempertimbangkan kekuatan semua sektor ekonomi, mengantisipasi prospek penurunan kinerja ekonomi daerah, merencanakan proyek ekonomi yang potensial, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan pemimpin masyarakat untuk melakukan aksi apa pun di daerah.

Dengan reformasi seperti ini diharapkan akan terjadi perubahan iklim investasi dan implementasi pembangunan di Indonesia. Presiden SBY pun menyadari adanya lima kunci sukses kabinet, yaitu adanya kejelasan visi, kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang efektif, manajemen yang baik, serta pemerintahan yang baik. Visi SBY untuk membangun dunia usaha yang adil, sehat, dan berkembang (Yudhoyono, 2004), perlu ditindaklanjuti dengan strategi dan langkah nyata sebagaimana diusulkan di atas. Semoga harapan perubahan yang diinginkan rakyat tidak hanya sekedar angin surga. ●

## Daftar Pustaka

- Alm, J., Robert, H., and Roy, B., 2001. 'Can Indonesia decentralise successfully? Plans, problem and prospects'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 37 No.1. April.
- Aswicahyono, H., and Hill, H., 2004. 'Survey of Recent Development'. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 40, No.3. December.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2003. *Memorandum no: 50/M/setama/2003*.
- BI, 2004. <http://www.bi.go.id>.
- BKPM, 2005. <http://www.bkpm.go.id>.
- GTZ, 2003. 'New survey on business climate in the regions'. *Decentralization news*. Issue No. 39. 34 January.
- Hofman, B., Kai, K. and Gunther, G.S., 2003. *Corruption and Decentralization*. International conference on 'Decentralization and its Impact on Local Government and Society'. May 15-17.
- Japan External Trade Organization (JETRO), 2003. *Japanese-Affiliated Manufacturers in Asia: Survey 2002*. March.
- KPPOD, 2002. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*.
- Krugman, P. (1994). *Competitiveness: a Dangerous Obsession*. *Foreign Affairs*, 73(2)(March/April).

## Topik: Evaluasi Pemerintahan Baru

- Kuncoro, M. (1995). Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan. *Prisma*, 4(April).
- Kuncoro, M. (2001). Regional Clustering of Indonesia's Manufacturing Industry: A Spatial Analysis with Geographic Information System (GIS). *Gadjah Mada International Journal of Business*, 3(3).
- Kuncoro, M. (2002). *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2003). *Pengelolaan Fundamental Ekonomi Daerah*, Jakarta: Badan Diklat Depdagri dan JICA.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. et al. (2004), *Domestic Regulatory Constraints to Labor Intensive Manufacturing Exports*, Report for GIAT-USAID, Jogjakarta: Pusat Studi Asia Pasifik UGM
- LPEM, 2000. *Construction of Regional Index of Cost of Doing Business in Indonesia*.
- LPEM and JETRO, 3003. *Impediments to Doing Business in Indonesia*.
- Malo, M. (1995). *Social Sector Decentralization: The Case of Indonesia*. Available: <http://idrc.ca/socdev/pub/indones/Indonesia.html> (2002, 3 September).
- Ma, J., & Hofman, B., 2000. *Indonesia's Decentralization After Crisis* (September). The World Bank. Available: <http://www1.worldbank.org/publicsector/premnote43.pdf> [2001, 1 February].
- SMERU, 2001. *Regional Autonomy and the Business Climate: Three Kabupaten Case Studies from North Sumatran*, Jakarta, May (mimeo)
- SMERU, 1999. *Deregulasi Perdagangan Regional: Pengaruhnya terhadap Perekonomian Daerah dan Pelajaran yang Diperoleh*. Desember.
- Suwandi, I Made, 2003. *Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*, Paper for Seminar on Reorientasi Implementasi Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal sebagai Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah, mimeo, July 15-18, 2003, Jakarta.
- Rahayu, S.K., and S. Sumarto, 2003. *The Practice of Industrial Relations in Indonesia*. SMERU Working Paper. March.
- Ray, D., 2001. *Inventory of Trade distorting Local Regulations*. Unpublished paper. Partnership for Economic Growth. Jakarta. December.
- Ray, D., 2002. *Notes on Domestic Trade and Decentralization*. Unpublished paper. Partnership for Economic Growth. Jakarta. December
- Ray, D. 2003. *Regulatory Reform and Local Government in Indonesia*. Paper presented at the 5th IRSA International

Conference, 18-19th July, 2003  
Bandung Indonesia.

*Kabupaten Case Studies from West  
Java.* SMERU Field Paper.

Regional Economic Development Institute  
(REDI), *Survei Persepsi Perilaku  
Usaha Tentang Otonomi Daerah dan  
Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di  
Daerah (Studi di 23 Kabupaten/Kota  
di Indonesia.*

World Bank (WB), 2003. *Indonesia Main-  
taining Stability, Deepening Reforms.*

Yudhoyono, Susilo Bambang, 2004.  
*Revitalisasi Ekonomi Indonesia:  
Bisnis, Politik dan Good Govern-  
ance.* Jakarta: Brighten Press.

Usman, S. et al, 2002. *Regional Autonomy  
and Business Climate: Three*

